

AKIBAT HUKUM ALIH FUNGSI TANAH WAKAF UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

EM. Nazaruddin Muhkam Alghifari

Magister Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
nazaruddinmuhkam@gmail.com

Abstrak

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang akibat keputusan sepihak alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum. Awal mula munculnya ide penulis adalah banyaknya alih fungsi tanah wakaf untuk program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini merupakan jenis pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus kemudian data yang terkumpul merupakan data primer dan didukung dengan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf, kitab-kitab salaf, dan pendapat para ahli yang kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Menurut Dr. H. Muhammad Ghazali, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahap alih fungsi meliputi: tahap sosialisasi, negosiasi, kesepakatan, pemberkasan, dan tahap pengadilan jika tidak terjadi kesepakatan antara pengelola wakaf dan penyelenggara alih fungsi. Beliau menegaskan dinyatakan sebagai putusan sepihak karena murni asumsi pengelola wakaf yang dari awal tidak sepakat dengan alih fungsi atau pada proses pengadilan pengelola wakaf tidak mau hadir tiga kali, sehingga diputus sepihak. Akibatnya, proses eksekusi setelah putusan tetap setelah 14 hari akan segera dilakukan alih fungsi sebagai bentuk tindak lanjut dari putusan pengadilan. Sehingga jika dilihat dari perspektif antara hukum islam dan hukum positif, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih mengarah pada hukum positif untuk memutuskan alih fungsi tanah wakaf. Sedangkan penulis sendiri memandang perlunya mengkomparasikan antara hukum islam dan hukum positif dalam hal ini. Perspektif Hukum Islam secara umum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam alih fungsi tanah wakaf, mulai dengan adanya masalah sampai dengan mewajibkan adanya *istibdal* bagi tanah wakaf yang dialih fungsikan. Perspektif hukum positif murni dengan adanya peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur pengalih fungsian tanah wakaf untuk kepentingan umum. Dengan demikian, perspektif penulis memandang bahwa alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum ini dapat dibenarkan, putusan pengadilan juga menjadi ujung tombak penyelesaian ketidak sepakatan alih fungsi tetapi tetap harus memperhatikan pertimbangan syariat yang sudah digariskan para Ulama` sebagai landasan utama.

Kata Kunci: Implementasi, Konsep Khaira Ummah, Karakter

Abstract

The aim of the thesis was describe the views of unilateral decision from the diversion function of waqf land for public interest by The Judge of The Religion Court at Kabupaten Malang. The background of the research was from several cases about the diversion function of waqf land was turned up beside development programs by the government. The design of the research was qualitative design with case study research. The data collected by primary data and it was supported by secondary data, namely legislation that concern about The Waqf, The Books of Salaf, and The Opinions from the authorities which were describe in this research. According to Dr. H. Muhammad Ghozali, S.H., M.H as The Judge of The Religious Courts of Kabupaten Malang, there were some phases about the diversion function of Waqf Land: The Socialization, Negotiation, Agreement, Filing, and Judicial phase if there was no agreement between the holder of waqf land and the caretaker of diversion. He emphasized that it was declared a unilateral decision because it was purely an assumption that the holder of waqf land did not agree from the beginning with caretaker of diversion or in the judicial process the waqf holder did not attend for three times, so it was unilaterally decided. As a result, the execution process after the final decision after 14 days will be immediately carried out as a form of follow-up to the court's decision. So if the researcher see the perspective between Islamic law and positive law, the Judges of the Religious Courts of Kabupaten Malang are more inclined to positive law to decide on the transfer of the function of waqf land. Whereas the researcher opinion there was need for a comparison between Islamic law and positive law in this regard.

Keywords: *waqf land, the diversion function*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan mengembangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam¹.

Selain pemanfaatan wakaf yang perlu ditingkatkan, pengalih fungsian tanah wakaf beserta bangunan yang ada di atasnya perlu landasan hukum yang tepat dan terperinci sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seputar alih fungsi wakaf yang sering terjadi di Indonesia seiring pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam hal pembebasan dan alih fungsi lahan sehingga menjadi tanah Negara (fungsi sosial) terjadi problem antara akad wakif dan harta yang diwakafkan dengan kebutuhan pemerintah untuk alih fungsi lahan untuk

¹Abdul Rachmad B, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2003), hlm.123.

kepentingan umum. Masalah ini sangat membutuhkan jawaban terutama dari instansi terkait karena sangat mengganggu di pikiran masyarakat bagaimana adanya tanah wakaf yang dialih fungsikan sedangkan akad wakaf sudah paten menurut Hukum Islam. Di lain hal asas fungsi sosial dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria juga harusnya menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa tentang wakaf ini.

Sering kali, cara terakhir yang digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan adalah dengan keputusan Pengadilan secara sepihak atau tanpa persetujuan pengurus Wakaf. Secara mudah merubah status Wakaf menjadi tanah Negara sehingga dapat mensukseskan pembangunan pemerintah. Dengan ini bisa pula dikatakan, tanah Wakaf (terbukti dengan dokumen atau tidak) telah terbebas dari hak kepemilikan siapapun alias menjadi milik Allah SWT. Apakah akan dengan akibat keputusan sepihak Pengadilan Agama bisa kembali menjadi milik Negara dengan berasaskan fungsi sosial.

Dengan banyaknya probematika yang terjadi sering kali penerapan Undang-Undang dengan melakukan keputusan sepihak dengan berdalih fungsi sosial juga banyak merugikan masyarakat. Tetapi, apa yang terjadi merupakan fenomena yang memerlukan kebijaksanaan Hakim dalam memutuskan hak-hak harta wakaf yang akan dialih fungsikan. Maka perlu kiranya penulis meneliti bagaimana pandangan hakim khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai ujung tombak hukum dalam memutus masalah ini sehingga sesuai dengan realita masyarakat dan tidak bertentangan dengan Hukum positif yang ada.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas maka diperoleh beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang proses Alih Fungsi tanah Wakaf untuk kepentingan umum?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang akibat keputusan sepihak alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum ?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang akibat keputusan sepihak alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pandangan Hakim tentang keputusan sepihak dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan realita dalam masyarakat yang menjadi lingkup wewenangnya. Sehingga pendekatan penelitian kualitatif ini adalah ingin mendeskripsikan teori dengan realita yang ada. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan penelitian kualitatif (deskriptif) karena penelitian ini berangkat dari suatu kerangka teori, pandangan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan untuk memperoleh suatu kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Datanya bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen resmi lainnya.

Peneliti memilih jenis ini karena dalam pengumpulan datanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Artinya peneliti hanya menganalisa dan menggambarkan secara objektif serta kritis guna mendapatkan hasil yang akurat, yang dikaji oleh peneliti dalam hal ini adalah Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Keputusan sepihak alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang proses alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum

Alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum ini sudah diatur prosesnya. Sebagaimana yang sudah dijabarkan di atas. Menurut pandangan Bapak Dr. H. Muhammad Ghozali, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memandang bahwa Alih Fungsi Tanah Wakaf merupakan sesuatu yang wajar dan memang banyak terjadi. Mengenai prosesnya semanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dikuatkan oleh fatwa MUI tahun 2009 tentang syarat administratif Alih Fungsi Tanah Wakaf.

Oleh karena itu, apabila ada Alih Fungsi tanah wakaf akan dilakukan sesuai proses yang berlaku selama ini. Adapun beberapa tahapan alih fungsi secara garis besar menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Tahap sosialisasi: pada tahap ini pemerintah/penyelenggara kepentingan umum mensosialisasikan agenda pembangunan pemerintah yang akan melakukan pembebasan lahan. Termasuk kepada para pengurus tanah wakaf untuk mendapatkan informasi bahwa akan diadakan pembangunan, pembebasan lahan, dan alih fungsi. Begitu juga mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait serta proses alih fungsi itu sendiri.
- b. Tahap negosiasi: pada tahap ini pemerintah penyelenggara kepentingan umum melakukan proses tawar-menawar untuk melakukan alih fungsi dengan pihak pengurus wakaf, begitu juga dengan masalah ganti rugi dan kepengurusan proses yang begitu panjang maka harus dilakukan dengan negosiasi supaya mendapatkan hasil yang disepakati semua pihak.
- c. Tahap penerimaan/kesepakatan: pada tahap ini Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang membagi tahapan menjadi dua bagian. Bagian pertama, jika pihak pengurus wakaf menerima adanya alih fungsi maka dilanjutkan kepada tahap pemberkasan (tahap selanjutnya). Bagian yang kedua, jika pihak pengurus wakaf tidak setuju dengan adanya alih fungsi dan tidak menemukan jalan keluar, maka pihak pengelola wakaf dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama di wilayah tanah wakaf tersebut untuk ditinjau secara hukum dan keputusan selanjutnya ada di tangan Pengadilan Agama.
- d. Tahap pemberkasan: tahap ini akan dilalui jika pengelola wakaf menyepakati adanya alih fungsi dan menyepakati ganti rugi dari alih fungsi tersebut. Maka dilakukan proses alih fungsi dari awal yang melibatkan semua pihak dan instansi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia.
- e. Tahap pengadilan: tahapan ini akan dilalui jika tidak terjadi kesepakatan alih fungsi antara pengelola wakaf dengan penyelenggara kepentingan umum. Pada kasusnya kebanyakan adalah pengelola wakaf yang mengajukan gugatan karena dengan berbagai alasan mereka tidak mau melepas tanah wakafnya untuk kepentingan umum. Maka segala keputusan dan hasil akhir akan melihat fakta dalam proses pengadilan dan dinyatakan dalam putusan alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Dr.H. Muhammad Ghozali, S.H., M.H mengatakan: keputusan penguasa (Hakim) menjadi penyelesaian dalam bidang apa saja, dalam hal ini Pengadilan Agama adalah sebagai wakil Umaro` dalam naungan Kementerian Agama.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang akibat pemutusan sepihak alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum

Dijabarkan pada bab sebelumnya, bahwa adanya pemutusan sepihak terjadi akibat ketidak sepakatan pengelola wakaf dengan adanya lih fungsi tanah wakaf sehingga berlangsung sampai ke Pengadilan Agama, terkhusus di Kabupaten Malang.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memandang adanya keputusan alih fungsi tanah wakaf itu sudah dipertimbangkan dalam tiga hal:

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Asas Maslahat dari adanya Alih Fungsi tanah wakaf
3. Tujuan dari wakaf itu sendiri. Dalam poin ketiga ini beliau menjelaskan bahwa tujuan dari tanah wakaf adalah adanya aset wakaf berupa tanah atau bangunan yang memang bersifat kekal. Sehingga pengelola wakaf sering kali merasa tidak sewajarnya jika tanah wakaf harus dialih fungsikan.

Dr. H. Muhammad Ghozali., S.H., M.H melanjutkan bahwa dalam hasil putusan alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang memang secara kasat mata sepihak. Namun proses peradilan yang berjalan sebagaimana mestinya membuat Putusan Pengadilan ini dirasa sepihak oleh penggugat (pengelola wakaf) saja karena memang dari awal sudah tidak sepakat dengan adanya alih fungsi. Dalam masalah ini Hakim Dr. Muhammad Ghozali memandang ada dua kemungkinan mengapa keputusan ini dapat dinyatakan keputusan sepihak.

1. Proses peradilan tentang alih fungsi tanah wakaf berjalan sesuai Hukum acara Pengadilan Agama, dan diputuskan bahwa tetap harus adanya alih fungsi dan eksekusi pengalih fungsian. Maka pihak pengelola wakaf merasa kalah dan alih fungsi dirasa sepihak. Padahal dalam hukum beracara Pengadilan Agama sudah ada proses mediasi serta proses-proses lain (proses beracara sudah dijabarkan sedikit pada bagian tinjauan umum tentang hukum acara pengaadilan agama) yang memfasilitasi kedua belah pihak untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Maka Beliau (Dr.

Muhammad Ghozali) menyimpulkan tidak ada istilah putusan sepihak dalam proses yang sedemikian rupa. Dan Beliau juga menegaskan akibat hukum yang kemudian ditimbulkan adalah mengikuti Putusan Pengadilan Agama untuk selanjutnya dieksekusi untuk pengalihfungsian.

2. Putusan Pengadilan Agama bisa saja dianggap sebagai keputusan sepihak. Dalam hal ini sepihak dalam arah pihak pengadilan. Putusan yang demikian disebabkan karena pada prosesnya, pihak penggugat tidak hadir sehingga dilakukan pemanggilan ulang, begitu juga dengan pemanggilan hingga tiga kali tetap tidak hadir maka akan dilakukan pemutusan secara sepihak oleh pengadilan karena dirasa pihak penggugat sudah tidak memperdulikan proses peradilan lagi. Dan akibatnya, setelah empat belas hari diputuskan akan dilakukan eksekusi alih fungsi tanah wakaf sesuai hasil putusan pengadilan.

Dr. H. Muhammad Ghozali, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang kembali memberikan pandangan Beliau bahwa Putusan tentang Alih Fungsi yang ada tidak lepas dari beberapa hal yang menunjang munculnya putusan sepihak tentang alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum. Diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya aturan pokok tentang wakaf dan alih fungsi tanah wakaf
2. Beliau sangat menegaskan bahwa Hakim akan memutuskan sesuai kasus yang ada. Tidak akan ada proses peradilan jika tidak ada kasus. Maka Hakim disini adalah ujung tombak dari permasalahan alih fungsi tanah wakaf ini.
3. Setiap kasus alih fungsi pasti tidak sepenuhnya sama. Sehingga berbeda kasus berbeda pula cara penyelesaiannya, maka akibatnya adalah akan berbeda-bedanya putusan yang dihasilkan. Bukan hanya jenis kasus, melainkan fakta persidangan selama proses peradilan juga akan mempengaruhi hasil Putusan Hakim terhadap kasus Alih Fungsi Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Umum.

Mengenai akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemutusan sepihak alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum ini dapat difahami dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. H. Muhammad Ghozali, S.H., M.H bahwa, akibat pemutusan sepihak ini maka pihak pengadilan akan melakukan eksekusi tanah wakaf yang akan dialih fungsikan setelah 14 (empat belas) hari putusan alih fungsi itu ditetapkan. Pihak eksekutor dari pengadilan akan melakukan pengosongan area aset wakaf untuk kemudian disiapkan proses alih fungsinya.

Dalam proses ini penyelenggara alih fungsi tetap harus melihat prosedur dan aturan perundang-undangan yang ada.

Dalam akibat yang ditimbulkan ini, Beliau menambahkan harus tetap dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan setiap tahapan alih fungsi. Hal ini dilakukan agar proses alih fungsi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lebih jauh lagi akibat yang ditimbulkan adalah munculnya penggantian aset wakaf, hal ini juga merupakan upaya pemerintah selaku pembuat peraturan untuk tidak menganggap bahwa tanah wakaf sama dengan yang lain dalam pengalifungsian.

C. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Hakim

Perspektif Hukum Islam terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama

Melihat pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum maka dalam perspektif Hukum Islamnya dapat ditarik pemahaman bahwa diperkenankan adanya alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum, baik berupa bangunan masjid yang ada di atasnya maupun selain masjid. Hanya saja dalam Hukum Islam tidak adanya prosedural secara administratif untuk melakukan administrasi. Hanya dilihat dari asas manfaat dan maslahat dalam alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Bapak Dr. H. Muhammad Ghozali menegaskan adanya alih fungsi tanah wakaf merupakan sebuah kewajaran yang terjadi seiring pembangunan pemerintah yang berkelanjutan. Hal ini sedikit tidak sejalan dengan madzhab syafii yang merupakan mayoritas dianut di Indonesia. Bahwa madzhab syafii berpendapat tidak memperbolehkan alih fungsi kecuali jika tanah wakaf tersebut sudah tidak berfungsi, adapun pendapat yang memperbolehkan wajib adanya penggantian dengan fungsi yang sama.

Oleh karena itu, perspektif hukum islam terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum sesuai dengan madzhab hanafiyah yang menyatakan bolehnya alih fungsi secara mutlak tetapi kurang sesuai dengan mayoritas madzhab syafii. Hal ini dapat sesuai jika dilakukan tukar guling atau *istibdal* dalam alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum.

5 Perspektif Hukum Positif Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama

Hakim merupakan ujung tombak penyelesaian sengketa tanah wakaf. Alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum yang dipaparkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah pasti sejalan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Terlebih lagi, dalam asas fungsi sosial dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 sudah secara paten ditetapkan setiap keperluan sosial yang akan diselenggarakan oleh pemerintah maka harus dialih fungsikan.

Prosedur yang telah ditetapkan akan dieksekusi sebagaimana mestinya. Jika tidak terjadi sengketa maka akan secara otomatis dilakukan proses pengalihfungsian. Sedangkan jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Agama. Hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang menilai adanya alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum ini harus dilihat dari alur dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, Beliau menyatakan untuk menyelesaikan masalah alih fungsi ini lebih condong kepada Hukum Positif karena aturan yang berlaku sudah semstinya diikuti. Di sisi lain, peraturan wakaf yang ada sedikit banyak berpatokan pada Hukum Islam dan mengenai alih fungsi tanah wakaf juga berpatoakan pada fatwa MUI juga.

Jadi, dalam hal alih fungsi ini Hakim berperan dalam penyelesaian sengketa saja, bukan masalah pengalihfungsian. Lebih lanjut lagi, masih ada banyak pertimbangan dalam memutuskan alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum. Mulai dari fakta persidangan, peraturan perundang-undangan, sampai dengan yurisprudensi.

Maka dapat difahami bahwa persepektif Hukum Positif terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sama persis dengan peraturan perundang-undangan dan Hakim baru akan menangani jika ada sengketa yang dilaporkan untuk selanjutnya dituntaskan sesuai Putusan Pengadilan.

KESIMPULAN

Dari penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Hakim Kabupaten Malang Bapak Dr. H. Muhammad Ghozali, S.H., M.H bahwa proses alih fungsi sudah sangat jelas dan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga Beliau menyimpulkan sendiri tahapan alih fungsi menurut Beliau, yaitu:

- a. Tahap sosialisasi
 - b. Tahap negosiasi
 - c. Tahap penerimaan/kesepakatan
 - d. Tahap pemberkasan
 - e. Tahap pengadilan/penyelesaian sengketa jika ada pihak yang tidak sepakat dengan adanya alih fungsi.
2. Pandangan Bapak Dr. H. Muhammad Ghozali, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pemutusan sepihak alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut:
- a. Dinyatakan sebagai putusan sepihak karena pihak pengelola wakaf sejak awal sudah tidak sepakat dengan adanya alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum.
 - b. Dinyatakan putusan sepihak karena pihak pengelola wakaf tidak hadir dalam persidangan sampai pemanggilan sebanyak tiga kali sehingga diputuskan sepihak oleh Hakim Pengadilan Agama.

Di sisi lain, Beliau memandang adanya aturan yang mendasari munculnya putusan sepihak dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya adalah:

- a. Aturan pokok perundang-undangan
 - b. Kasus yang ada merupakan tanggung jawab Pengadilan untuk memutuskan
 - c. Kasus Alih fungsi tanah wakaf pada dasarnya berbeda-beda sesuai dengan kenyataan di lapangan.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ghozali, S.H., M.H memandang dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, karena Beliau seorang Hakim Beliau lebih condong kepada Hukum Positif tentang alih fungsi untuk menyelesaikan perkara. Sehingga perspektif Hukum Islam dalam pendapat Hakim ini kurang sesuai khususnya madzhab syafii. Dalam Hukum Positif Beliau sangat beracuan pada Peraturan Perundang-undangan yang ada dan menjadi rujukan utama untuk memutuskan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Baathiyah, Muhammad Ali. 2015. *Zaadul Labib*, Mukalla: Maktabah Tareem Al-Haditsah.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.

Hasan, Cik. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Kementerian Agama. 1971. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta: KEMENAG.

Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.

Sulistiani, Siska. 2017. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.